

Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (e-BES) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Nur Febrianti, Eva Hany Fanida

Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Surabaya

ARTICLE INFO

Article history:

Received 20 June 2026

Revised 20 June 2026

Accepted 25 June 2026

Available online 22 July 2026

Keywords

effectiveness, Village-Owned Enterprise (BUMDes), e-BES, digital transformation, e-government, BUMDes management.



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Yayasan Daarul Huda

ABSTRACT

Digital transformation in village governance has encouraged Village-Owned Enterprises (Badan Usaha Milik Desa or BUMDes) to adopt information technology-based systems to improve the effectiveness of business management and public service delivery. One such innovation is the Sugihwaras Electronic BUMDes (e-BES) application, developed by the "Sukses Bersama" BUMDes in Sugihwaras Village, Candi District, Sidoarjo Regency, as a digital platform for marketing micro, small, and medium enterprise (MSME) products and providing digital transaction services. This study aims to analyze the effectiveness of the e-BES application in the management of BUMDes in Sugihwaras Village. A qualitative descriptive approach was employed. Data were collected through observation, interviews, and documentation and analyzed using data reduction, data display, and conclusion drawing techniques. The analysis of system effectiveness was based on the framework proposed by Aprilia et al. (2014), which consists of eight dimensions: the role of the system, the role of government, system objectives, accessibility, system content, system interaction, supporting factors, and inhibiting factors. The findings indicate that the implementation of the e-BES application in BUMDes

management has not yet been fully effective. Although the application has improved access to information, facilitated the marketing of MSME products, and supported digital-based public services, its implementation continues to face several challenges, including limited human resource capacity in system management, gaps in digital literacy among community members, prolonged system maintenance, inadequate public outreach, and application features that remain under development.

ABSTRAK

Transformasi digital dalam tata kelola pemerintahan desa mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk mengembangkan sistem berbasis teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha dan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu inovasi tersebut adalah aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (e-BES), yang dikembangkan oleh BUMDes "Sukses Bersama" Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo sebagai media pemasaran produk UMKM dan layanan transaksi digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem aplikasi e-BES dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sugihwaras. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis efektivitas mengacu pada teori Aprilia et al. (2014) yang meliputi delapan aspek, yaitu peran sistem, peran pemerintah, tujuan sistem, jangkauan akses, konten sistem, interaksi sistem, serta faktor pendukung dan penghambat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi aplikasi e-BES dalam pengelolaan BUMDes belum berjalan secara efektif. Meskipun aplikasi telah memberikan kemudahan akses informasi, pemasaran produk UMKM, dan mendukung pelayanan berbasis digital, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan sistem, kesenjangan literasi digital masyarakat, proses pemeliharaan sistem yang berlangsung lama.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah mendorong perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk tata kelola pemerintahan. Pemanfaat-

tan teknologi informasi tidak hanya mempermudah proses komunikasi dan penyebaran informasi, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi informasi merupakan seperangkat perangkat keras (*hardware*), perangkat lunak (*software*), sumber daya manusia (*humanware*), serta metode yang digunakan untuk memperoleh, mengelola, menyimpan, dan mendistribusikan informasi secara optimal (Ramdhani et al., 2018). Perkembangan teknologi telah dimanfaatkan pada berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, industri, transportasi, dan pelayanan publik, sehingga menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung pembangunan nasional (Mellia, 2021; Oktariyanda & Rahaju, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sektor publik diwujudkan melalui penerapan *electronic government (e-government)*, yaitu penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, efektivitas administrasi, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat (Fanida & Fidiansih, 2020). Implementasi *e-government* di Indonesia berkembang dalam berbagai bentuk, mulai dari portal berbasis website hingga aplikasi digital yang mendukung pelayanan administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, maupun sistem kepegawaian (Yunita & Aprianto, 2018). Keberhasilan implementasi *e-government* diharapkan mampu menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Yogiswara et al., 2014).

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah berkewajiban menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, dan dapat dipahami oleh masyarakat sebagai bentuk pemenuhan hak atas informasi. Kewajiban tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menegaskan bahwa informasi merupakan kebutuhan dasar masyarakat sekaligus hak asasi setiap warga negara (Zahra, 2020). Implementasi keterbukaan informasi publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah, tetapi juga hingga tingkat pemerintahan desa sebagai unit pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat.

Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa diberikan kewenangan yang luas dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa. Kewenangan tersebut menuntut pemerintah desa untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang profesional, transparan, efektif, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi (Rahmawati & Tyas, 2020). Penggunaan sistem informasi desa mampu mendukung proses pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat transparansi pengelolaan pemerintahan desa, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa (Fitri et al., 2017).

Salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa untuk mengelola aset, jasa, dan usaha lainnya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUMDes tidak hanya berfungsi sebagai lembaga ekonomi desa, tetapi juga menjadi sarana pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan potensi lokal, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) (Sarkawi et al., 2020). Oleh karena itu, pengelolaan BUMDes yang profesional dan berbasis teknologi menjadi salah satu strategi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa.

Transformasi digital turut mendorong pengelolaan BUMDes berbasis teknologi informasi melalui pemanfaatan aplikasi digital dan *marketplace*. Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu daerah di Provinsi Jawa Timur yang aktif mengembangkan digitalisasi BUMDes. Berdasarkan

data Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Sidoarjo, pada tahun 2021 terdapat 183 BUMDes yang telah terdaftar dan tersebar di 18 kecamatan (Nanda, 2022). Salah satu BUMDes yang menunjukkan perkembangan signifikan adalah BUMDes "Sukses Bersama" Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi. BUMDes tersebut berhasil mengembangkan berbagai unit usaha berbasis potensi lokal sekaligus memperoleh penghargaan sebagai BUMDes Digital pada Konferensi Desa SDGs Tahun 2020 melalui inovasi layanan digital yang dikembangkannya.

Inovasi tersebut diwujudkan melalui aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (e-BES), yaitu platform digital berbasis *marketplace* yang berfungsi sebagai media pemasaran produk usaha masyarakat desa sekaligus sebagai sarana pelayanan transaksi digital. Aplikasi ini menyediakan berbagai layanan, seperti pemasaran produk UMKM desa, pembayaran tagihan listrik, BPJS, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), serta berbagai layanan pembayaran lainnya melalui kerja sama dengan PT Pos Indonesia. Kehadiran e-BES diharapkan mampu memperluas akses pasar bagi pelaku UMKM desa, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pemanfaatan teknologi digital (Widayanti & Oktafia, 2021).

Meskipun demikian, implementasi e-BES masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagian pelaku usaha masih memiliki tingkat literasi digital yang rendah sehingga belum memanfaatkan aplikasi secara optimal. Selain itu, terdapat anggapan bahwa platform *marketplace* komersial memiliki fitur yang lebih lengkap dibandingkan e-BES. Permasalahan lain meliputi keterbatasan kemampuan pengelola dalam mengelola pemasaran digital, kurangnya pelatihan yang berkelanjutan, serta belum optimalnya kegiatan monitoring dan evaluasi sehingga pembaruan informasi dalam aplikasi belum berjalan secara maksimal (Afandi et al., 2022). Widayanti dan Oktafia (2021) juga mengemukakan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui keberadaan maupun cara penggunaan aplikasi e-BES.

Berbagai permasalahan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan transformasi digital dalam pengelolaan BUMDes tidak hanya ditentukan oleh keberadaan teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, strategi implementasi, dan penerimaan pengguna terhadap sistem yang dikembangkan. Hingga saat ini, penelitian mengenai e-BES masih lebih banyak membahas aspek pengembangan inovasi digital dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas implementasi aplikasi dari perspektif pengguna masih relatif terbatas. Kondisi tersebut menjadi *research gap* yang penting untuk dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi Sistem Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (e-BES) dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan tata kelola BUMDes berbasis digital sekaligus menjadi masukan bagi pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas layanan, transparansi, dan keberlanjutan transformasi digital di tingkat desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan dan rancangan penelitian deskriptif kualitatif. Penentuan subyek dalam penelitian ini ditetapkan secara *purposive sampling* yaitu pemerintah desa dan masyarakat yang dianggap mempunyai informasi dalam kaitannya dengan efektivitas sistem aplikasi e-BES.

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat terumuskan hipotesis kerja (Moleong Lexy,

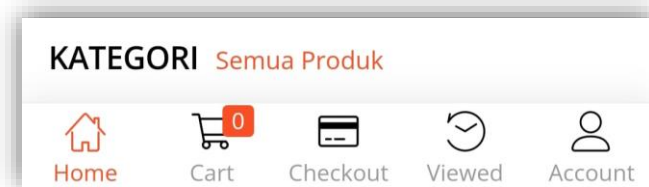
2018). Teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yakni: reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), penarikan serta pengujian kesimpulan (*drawing dan verifying conclusions*) Pawito (dalam Triadi, 2022).

HASIL

Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*)

Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) adalah inovasi software yang diusulkan guna pembaharuan sistem manual pengelolaan BUMDes “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras menuju pengelolaan BUMDes digital. *e-BES* merupakan wujud penerapan teknologi informasi komunikasi dan pengelolaan sekaligus *marketplace online* BUMDes Sugihwaras. Software ini merupakan program inovasi pengelolaan BUMDes yang sudah diterapkan di seluruh lapisan masyarakat Desa Sugihwaras dibuat untuk memwadahi produk penjualan, transaksi pembelian, hingga layanan pembayaran tagihan PLN, PDAM, Pajak Kendaraan, PBB, dan Wi-Fi. Melalui elektronik BUMDes Sugihwaras ini masyarakat dapat dimudahkan dalam bertransaksi hingga menciptakan kontrol pekerjaan pengelolaan BUMDes. Calon pengguna dapat mudah mengakses aplikasi *e-BES* dengan hanya mengunduh aplikasi *e-BES* di playstore.

Bagi pengguna sebagai calon penjual produk maupun pembeli bisa langsung melakukan pendaftaran akun sesuai kategori. Penjual dalam aplikasi ini hanya diperbolehkan bagi warga asli Desa Sugihwaras dengan sistem penyaringan pendaftaran oleh pengelola BUMDes Sukses Bersama. Persyaratan pendaftaran akun pengguna diperlukan identitas diri, menyiapkan nomor induk kependudukan sesuai KTP untuk proses verifikasi data warga berdomisili Desa Sugihwaras. Menyediakan informasi kontak, wajib memiliki alamat e-mail aktif dan nomor WhatsApp yang dapat dihubungi untuk menerima notifikasi pesanan atau kode verifikasi. Tidak lupa melengkapi data pendukung dengan mengisi nama lengkap sesuai identitas dan menetapkan kata sandi (*password*) untuk keamanan akun.



Gambar 1 Tampilan Dashboard Bawah di Menu Utama Aplikasi *e-BES*

Sumber: Play Store, 2026

Pada tampilan utama terdapat lima menu utama yang terletak di navigasi bawah, diantaranya:

1.) Menu *Home* (Beranda)

Menyajikan informasi denah awal kepada pengguna *e-BES*, menampilkan spanduk promosi terkait kategori produk dan rekomendasi produk untuk menarik minat beli pengguna sejak kesan pertama.

2.) Menu *Cart* (Keranjang)

Berperan sebagai arsip penyimpanan data sementara bagi produk UKM yang dipilih pelanggan sebelum tahap transaksi. Fitur ini memungkinkan pengguna *e-BES* untuk melakukan manajemen pesanan, seperti mengubah kuantitas atau menghapus item, serta memberi ringkasan total biaya dikemudian waktu apabila terdapat ketidakpastian informasi harga seperti pada saat adanya turun atau naiknya harga jual produk.

3.) Menu *Checkout*

Alur transaksi yang memproses konversi dari niat beli menjadi pembeli pasti, menu ini memadukan data pesanan dengan sistem pembayaran dan pengiriman.

4.) Menu *Viewed*

Fitur ini berfungsi sebagai *history* atau rekam jejak digital dari aktivitas eksplorasi pengguna *e-BES*. Terutama bagi pengguna konsumen, fitur ini memudahkan pengguna menemukan kembali produk yang pernah mereka lihat atau beli tanpa perlu melakukan pencarian ulang.

5.) Menu *Account* (Akun)

Manajemen profil yang menyimpan data personal pengguna dan mengatur preferensi pengguna *e-BES*.

Dengan ini, manajemen pengelolaan BUMDes Sukses Bersama Desa Sugihwaras melalui sistem aplikasi yang berlaku yakni *e-BES*, dapat dilihat dan diawasi secara langsung oleh pengguna, sehingga dapat terwujud *monitoring* dan evaluasi berskala.

Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo

Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) berjalan dan dikembangkan oleh BUMDes Sukses Bersama sejak awal 2020 lalu. BUMDes “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras sudah menggunakan *e-BES* dalam waktu kurang lebih 1-2 tahun lamanya pada tahun 2020-2021, namun sayangnya di tahun 2022 terjadi *error* sistem hingga pada tahun 2023-2026 kembali diaktifkan namun tetap dengan proses uji coba. *e-BES* melalui proses *maintenance* dan perbaikan kegagalan fungsi (*bug*) fitur dan juga validasi fitur. Karenanya untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Sistem Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo, penulis menggunakan teori efektivitas sistem yang dikemukakan oleh Aprilia, dkk (2014:130).

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait tahap *emerging* (pemunculan) dapat diketahui bahwa adanya *e-BES* dilatar belakangi karena adanya covid-19. Diluncurkannya *e-BES* sebagai bentuk upaya pemerintah desa untuk memberdayakan masyarakat Desa Sugihwaras ditengah pandemi atau pembatasan dalam skala besar. Masyarakat mengenal *e-BES* melalui acara Program Pendampingan UMKM di Desa Sugihwaras. Pada tahap pemunculan, kemampuan fitur *e-BES* masih sangat terbatas hanya memuat informasi terkait produk UMKM saja. Begitupun juga pada operasi sistem *e-BES* penjual belum bisa terhubung secara langsung, melainkan harus menghubungi terlebih dahulu melalui chat pribadi di WhatsApp. Pada tahap ini sistem *e-BES* belum bisa memproses secara langsung transaksi penjualan. Bagi penjual yang mendaftarkan produk dengan deskripsi produk kurang informatif atau tidak mencantumkan kontak, maka proses jual beli dan transaksi masih dengan menggunakan bantuan pihak ketiga sebagai perantara. Pembeli dan penjual tidak terhubung secara langsung namun masih melalui admin BUMDes. Adanya celah kekurangan pada tahapan ini tidak menutup kemungkinan bahwa di tahap berikutnya akan tetap diusahakan pengembangan sistem oleh perangkat desa atau oleh perancang *e-BES*.

1.) Tahap II – *Enhanced* (Peningkatan)

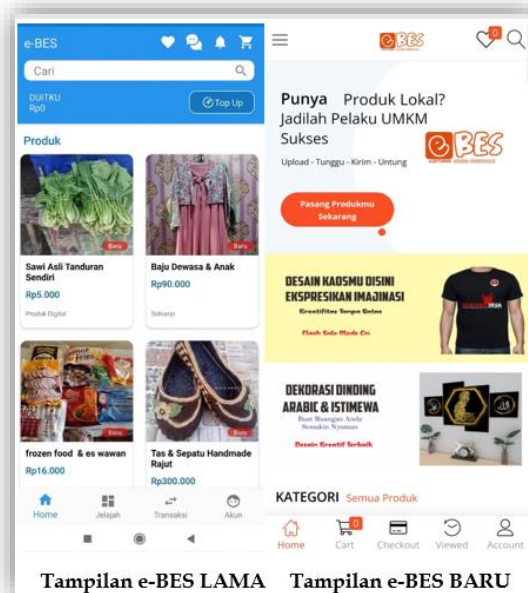
Aspek tahap *Enhanced* (peningkatan) berfokus pada pembaruan konten secara berkala dan tambahan fitur setelah melewati tahap pertama, tahap *emerging* (pemunculan). Pada tahap kedua ini di tahun 2022 *e-BES* menuju tahap usaha pengembangan berkelanjutan sistem oleh pemerintah desa. Disampaikan dalam wawancaranya, Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES*, menyatakan bahwa:

“Pada tahun 2022 awal *e-BES* sempat mengalami error sistem dikarenakan terbelengkalai pemeliharaan sistemnya di tahun sebelumnya.. di tahun 2022 ini memang bersamaan dengan perombakan kepengurusan pengelola BUMDes, sehingga tidak ada pengawasan terkait berjalannya *e-BES* mbak. Sebenarnya sangat disayangkan di perjalanan tahun 2022 saya perbarui tampilan *e-BES*nya mbak. Tampilan yang sedikit lebih rapi dari sebelumnya. Begitupun dengan icon *e-BES* dari tampilan tahun 2020 ke 2022 ini baru. Cuma memang untuk deskripsi produk juga masih proses kami perbaiki.. karena kami perbarui tata letak tampilannya. Proses transaksi pembayaran juga masih kami usahakan supaya bisa terhubung langsung, sampai di tahun 2023 dengan saat ini kami coba untuk membangun ulang sistem dengan rencana menambahkan juga fitur serupa layanan pesan antar (*delivery order*) yang mana sebelumnya tidak ada fitur tersebut.”

Dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Nur Amiril dalam wawancaranya, bahwa:

“Karena sebelumnya masih menggunakan sistem transaksi manual.. Pembayaran penjual – pembeli COD atau di lapak. Apabila melalui admin BUMDes, produk diambil di BUMDes pencairan saldo manual melalui pengelola atau admin BUMDes. Kami usahakan BUMDes tidak akan mencari keuntungan sepeserpun melalui biaya penanganan. Kita rencanakan pasang sistem PPOB disitu, seperti kita melaksanakan transaksi pesan langsung masuk saldo kepotong. Dulu manual apabila ada pembeli pesan, penjual memproses pemesanan by WA atau pengelola BUMDes (admin) menghubungi by WA kepada penjual produk.. BUMDes melayani sebagai penghubung bila diperlukan. Maka dari itu saya mengupayakan upgrade ke penggunaan Aplikasi Berbasis Hasil Integrasi (ABHI) bisa dipahami juga sebagai sistem jaringan layanan berbasis agen dengan integrasi data terpusat. Sebelumnya masih CNS Wordpress atau sistem manajemen dan distribusi konten saja, memuat informasi secara global”

“Kami kembali sosialisasikan *e-BES* bersamaan pada kegiatan-kegiatan desa seperti pada saat PKK, kami lakukan juga promosi dari mulut kemulut atau getok tular ya mbak.. kami kenalkan juga melalui Grup WhatsApp desa kami kerahkan Bapak Ibu RT/RW untuk menginformasikan ke warganya.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)



Gambar 2 Gambar Tampilan *e-BES* Lama dan Baru

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Seiring berjalannya waktu dan meningkatnya kebutuhan pengguna, perjalanannya sistem semula dengan kemudian tidak terlepas dari keterbatasan teknis yang menuntut adanya perbaikan. Disampaikan oleh Bapak Saiful selaku Kepala Desa terkait *e-BES* dari awal tahap kemunculan hingga melalui tahap ke dua ini:

“Tentu pada proses peningkatan *e-BES* tidak mudah, kami masih berusaha memperkenalkan *e-BES* dengan jangkauan yang lebih luas mbak. Selain itu, inikan juga sistem aplikasi buatan yang tergolong masih kecil. Kami masih perlu banyak pembaharuan dan perkembangan sistem. Saya paham betul mbak.. Bapak Nur Amiril itu, selaku yang membuat aplikasi *e-BES* ini.. sedang berjuang untuk coba terus perbaikan sistem. Ini juga karena diakibatkan adanya kelalaian pengawasan, karena yang saya tau sempat ada perombakan kepengurusan BUMDes Sukses Bersama” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Kemudian hasil wawancara dengan Bapak Nawi selaku Ketua Pengelola BUMDes Sukses Bersama, dalam wawancaranya disampaikan:

“Kalau peningkatan di tahun berikutnya sistem aplikasi *e-BES* saya kurang paham banyak ya mbak, cuma pas itu tetap diarahkan oleh Pak Nur Amiril untuk tetap mengenalkan *e-BES* ke warga. Dan diberitau kalau semisal pada saat digunakan susah masuk atau error.. berarti aplikasinya masih diperbaiki” (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2026)

Pendapat lain disampaikan oleh beberapa sasaran pengguna *e-BES*, diantaranya:

Pak Nanang selaku koordinator keuangan tenda lapak UMKM di BUMDes, menyampaikan:

“Keberlanjutannya saya kurang paham pasti mbak, cuma memang tetap diinfokan itu di WA nya bapak ibu perangkat.. terus ya ada di beberapa kegiatan katanya tampilan baru. Tapi tidak ada lanjutan gimana soal penggunaan jadi ya saya sendiri tidak coba download.” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2026)

Ibu Hartatik penjual sayur, sekaligus beliau sebagai penyewa tenda lapak UMKM. Menyampaikan:

“Saya kurang tau kalau selanjutnya *e-BES* bagaimana, yaa terakhir saya gunakan dengan bantuan BUMDes. Untuk jualannya konsepnya saya siapkan pesanan pembeli sesuai yang diinfokan dari WA BUMDes kalau mau ambil ya tergantung pembelinya ke lapak atau saya antar ke BUMDes. Pembayarannya ditempat mbak. Tampilan baru saya kurang tau, tampilan lama itu ya ada foto dagangan saya gitu aja yang saya tau. Dan foto dagangannya warga lain.” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2026)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait tahap *enhance* (peningkatan) dapat diketahui bahwa upaya sosialisasi sudah dilakukan secara lebih luas melalui beberapa kegiatan desa. Begitupun upaya perbaikan tampilan sistem juga sudah dilakukan. Namun demikian, secara teknis pembaruan aplikasi *e-BES* masih belum mencapai tahapan peningkatan yang signifikan. Pada tahap ini masih berfokus pada tahapan evaluasi, perencanaan peningkatan, serta perbaikan fungsi layanan di dalam sistem.

2.) Tahap III – *Interactive* (Interaktif)

Aspek tahap *interactive* (interaktif) berfokus pada bagaimana sebuah sistem *e-BES* mampu dikenalkan oleh pemerintah desa atau pengelola BUMDes kepada pengguna, dikenali hingga dapat diakses sebagai elektronik BUMDes yang menyediakan atau menghasilkan sarana informasi sekaligus aplikasi berbasis ekonomi. Selain itu pada tahap ini, memuat indikator capaian fitur pengaduan atau kolom umpan balik. Secara teknis capaian ini memungkinkan adanya keterlibatan publik untuk bersama-sama menilai bagaimana *e-BES* difungsikan.

Dalam wawancara, Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* melalui penjelasannya menyampaikan:

“Tidak ada penawaran interaktif dari pemerintah desa mbak.. tidak ada iming-iming gitu ya yang dimaksudkan mbaknya sehingga seperti janji apabila menggunakan aplikasi ini akan mendapatkan keuntungan sekian.. atau produknya laris manis. Tidak ada mbak, mengalir begitu saja melalui sosialisasi yang terjadi dari pertama kali kami mengenalkan hingga berjalan di tahun-tahun berikutnya. Kami kenalkan bahwa aplikasi *e-BES* dapat mudah di akses di playstore tinggal *download* saja. Kami sampaikan apabila terdapat keluhan dan saran terkait sistem aplikasi *e-BES* bisa komen di playstore. Pada menu tampilan lama, kalau untuk review produk juga ada mbak di bawah deskripsi produk tentang ulasan pembeli. Tapi kalau untuk di tampilan baru ini masih belum tercantum review produk. Perangkat desa selalu berusaha menanamkan prinsip desa maju kepada masyarakat, mementingkan pembelian sekitar melalui *e-BES*.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait tahap *interactive* (interaktif) dapat diketahui bahwa pada aplikasi *e-BES* di tampilan pertama, perancang sistem sudah mewadahi adanya review di produk penjualan. Yakni berupa rating produk. Sedangkan pada *e-BES* tampilan kedua belum mencapai tahap interaktif, hal ini ditandai dengan adanya pengguna sebagai pembeli tidak bisa berkomunikasi langsung dengan penjual. Belum tersedia kolom *review*, bahkan hanya untuk sekedar *rating* produk belum tercantum di dalam sistem.

3.) Tahap IV – *Transaction* (Transaksi)

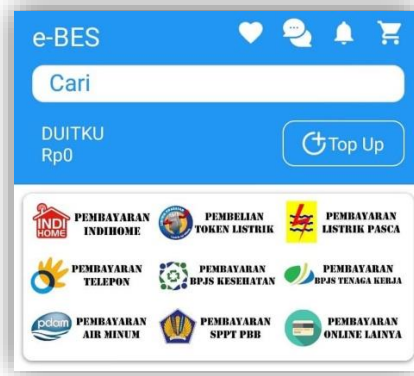
Aspek tahap *transaction* (transaksi) berfokus pada bagaimana pengelolaan BUMDes dalam menjalankan sistem aplikasi elektronik berperan sebagai pusat layanan digital yang menghubungkan BUMDes dengan masyarakat dan sektor komersial. Penerapan konsep *e-BES* terbagi menjadi dua model utama. Pertama yakni *Government to Citizen* (G2C) untuk pelayanan langsung ke warga, yang kedua adalah *Government to Business* (G2B) untuk relasi perdagangan.

Dalam wawancaranya, Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* menyampaikan:

“Sesuai dengan latar belakang diciptakannya *e-BES* dan tujuannya, jadi gambaran transaksi yang terjadi dan berjalan dalam aplikasi yaa di desain seperti penjualan produk atau pasar lokal. Di *e-BES* kan yaa tersedia semua produk buatan lokal UMKM. Kemudian juga terpasang iklan jasa dan rencana terkait pelayanan PPOB (*Payment Point Online Bank*).” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Dalam wawancaranya Ibu Fitri selaku Ketua Pengawas BUMDes sekaligus admin *e-BES* menambahkan:

“Ya mbak.. *e-BES* ini saya anggap seperti wadah untuk memfasilitasi operasional BUMDes supaya lebih efisien. Kalau perbaikan sistem ini nanti berhasil, akan memudahkan BUMDes Sukses Bersama untuk melayani warga. Selain itu kan bukan hanya memasarkan produk saja ya mbak, untuk penyedia jasa juga di iklankan di halaman utama *e-BES*. Terus juga soal pelayanan pembayaran tagihan.. *e-BES* belum di fungsikan. Saya masih melayani manual dikantor dengan bantuan Agen Pospay. Kalo saat ini melihat dari tampilan sistem *e-BES* pertama dan kedua masih sejauh berbentuk iklan, terutama saya rasa di bidang jasa... belum ada interaksi yang dihasilkan dari penyewa melalui aplikasi *e-BES* untuk memakai jasanya. Ya menurut saya bentuk interaksi antara pemerintah desa atau BUMDes kepada masyarakat, juga kepada pelaku usaha belum maksimal.” (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2026)



Gambar 3 Gambar Tampilan Menu Pembayaran Tagihan di e-BES Lama

Sumber: Dokumentasi Pribadi, 2026

Pak Nanang selaku koordinator keuangan tenda lapak UMKM di BUMDes, menyampaikan: “Ya kalau menurut saya mbak.. buat mencapai yang mbak maksud soal adanya *e-BES* menjadi tempat pelayanan warga dan menambahkan relasi perdagangan itu belum tercapai ya mbak. Kembali lagi dari yang selama ini dijalani, seperti jawaban saya soal *e-BES* tadi di awal.. masyarakat desa terkhususnya bagi ini si para pelaku usaha itu masih banyak yang belum mengenali *e-BES*.” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2026)

Berdasarkan pada hasil wawancara dengan narasumber terkait tahap *transactional* (transaksi) dapat diketahui bahwa selama berjalannya *e-BES* belum ditemukan gambaran transaksi yang jelas terkait konsep G2C dan G2B. Penyebabnya dikarenakan implementasi pengembangan sistem membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian juga rencana terkait penyingkronan sistem PPOM di *e-BES* belum terealisasi dengan status rencana hingga saat ini.

4.) Tahap V – *Connected* (Koneksi)

Aspek tahap *connected* (koneksi) merupakan fase tertinggi dalam perubahan pemerintahan elektronik bukan hanya sebagai penyedia layanan digital, tetapi mengubah dirinya menjadi perpanjangan tangan yang mampu merespons kebutuhan masyarakat secara proaktif dan menyeluruh. Hingga saat ini *e-BES* belum terhubung dengan unit-unit pelayanan yang lainnya, masih berupa unit pelayanan tunggal sebagai penyedia informasi produk UMKM desa. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* menyampaikan:

“Aplikasi *e-BES* sendiri sampai sekarang masih sebatas media penyampaian informasi saja sih mbak.. seperti yang sudah kami jelaskan tadi.. produk yang kami tawarkan di *e-BES*, yaitu produk UMKM. Untuk bentuk pelayanannya terkait jual-beli jika dibutuhkan maka melalui pihak admin BUMDes. Begitupun juga rencana memcantumkan sistem PPOB kan masih diupayakan. Jadi sampai sekarang aplikasi *e-BES* belum terkoneksi dengan lembaga manapun.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Bu Fitri selaku Ketua Pengawas BUMDes sekaligus admin *e-BES* juga menegaskan terkait pernyataan tersebut:

“Benar ya mbak, seperti yang tak jelaskan tadi sebelum sebelumnya.. *e-BES* masih sebatas itu. Apalagi sekarang juga masih dalam tahap perbaikan dan pengembangan yang belum selesai, tentu *e-BES* belum terhubung dengan lembaga-lembaga lain. Masih di upayakan oleh pak Nur Amiril.” (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara narasumber, pada tahap ke lima diketahui bahwa sistem aplikasi e-BES belum terhubung dengan unit lembaga lainnya. Hal tersebut juga karena dipengaruhi oleh sistem yang masih melalui tahap perbaikan.

Melalui lima tahapan, yang berisikan: *Emerging* (Kemunculan), *Enhance* (Peningkatan), *Interactive* (Interaktif), *Transactional* (Transaksi) dan *Connected* (Koneksi). Berdasarkan hasil wawancara oleh beberapa narasumber, peran sistem aplikasi e-BES sampai saat ini berada pada tahap I - Tahap *Enhance* (Peningkatan). Hal tersebut diidentifikasi dari tahapan lanjutan di tahap peningkatan, interaktif, transaksi, koneksi belum memenuhi target pelayanan yang efektif karena e-BES sedang terhambat perbaikan peningkatan sistem pada tahap *enhance* (peningkatan).

Peran Pemerintah

Pada aspek peran pemerintah ini berfokus pada sejauh mana peran dari pihak-pihak terkait dalam keterlibatan perwujudan dan pengembangan sistem aplikasi e-BES. Pemerintah Desa Sugihwaras selaku pembuat sistem e-BES dibantu oleh admin BUMDes berperan sebagai pengguna dan pengelola e-BES. e-BES digunakan oleh pemerintah desa sebagai media untuk memberdayakan perekonomian masyarakat Desa Sugihwaras. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi e-BES dalam wawancaranya menyampaikan:

“Dengan usaha-usaha kami saat menjalankan e-BES dimulai dari memperkenalkannya kepada masyarakat desa, saya rasa cukup ya mbak.. melalui admin BUMDes juga tetap pada tugasnya dalam menjalankan penggunaan e-BES. kami mengupayakan upgrade sistem sekalipun tidak saya sadari bahwa tidak cukup waktu untuk bisa fokus dalam tahap *maintenance*. Usaha lain, kami coba menjaring mahasiswa KKN yang ditugaskan di Desa Sugihwaras saya cari yang mahir di bidang IT untuk ikut serta memberi usul dan saran untuk perkembangan.. hasilnya adalah sering kali mahasiswa tersebut mengakui belum bisa memahami dan membantu terkait perbaikan sistem yang saya buat ini.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemerintah masih berupaya mengoptimalkan sistem aplikasi e-BES. Dilakukan serangkaian upgrade dan pembaruan dengan menggandeng mahasiswa KKN bidang IT setiap ada kesempatan. Disampaikan terutama dari para pengguna e-BES, diantaranya tidak mengetahui dengan pasti terkait perkembangan e-BES dari awal peluncuran hingga saat ini. Untuk itu, kembali kepada tolak ukur bagaimana peran pemerintah dalam mengenalkan aplikasi e-BES secara merata. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peran pemerintah belum maksimal sekalipun sudah berusaha menyiarkan melalui grup warga, by WA maupun di kegiatan-kegiatan desa.

Tujuan Sistem

Aspek ini berfokus pada tujuan dan diterapkannya sistem elektronik desa (aplikasi) dalam pengelolaan BUMDes Sukses Bersama. Elektronik BUMDes Sugihwaras (e-BES) dibentuk dengan tujuan utama untuk mengatasi dampak ekonomi pada saat dan setelah Covid-19. Dengan cara mendigitalisasikan produk UMKM masyarakat Desa Sugihwaras. Selain dirancang dengan standar *e-commerce*, e-BES diciptakan oleh pemerintah desa dengan tujuan agar seluruh pelayanan masyarakat seperti pembayaran tagihan listrik, air, BPJS, dan lain lain dapat diselesaikan langsung melalui penerapan pengelolaan BUMDes digital. Dengan demikian kebutuhan administrasi dan pembayaran bulanan menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien.

Sistem e-BES merupakan portal digital yang dikelola BUMDes sebagai sarana untuk mengintegrasikan potensi lokal dengan ekosistem ekonomi yang ada di desa. Kehadiran sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi desa. Sebagaimana hasil wawancara dengan

Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES*, menyampaikan:

“Sesuai dari apa yang saya sampaikan tadi ya, yaitu untuk memberdayakan masyarakat ditengah pandemi. Kami sebagai pemerintah desa berupaya mbak untuk cari solusi yang tepat bagaimana masyarakat Desa Sugihwaras ini mudah akses layanannya... dan tentu kami berupaya mempertahankan ketahanan ekonomi desa juga.. pada saat itu menghawatirkan. Rilislah *e-BES* ini, berawal dari kami melihat tuntutan kebutuhan masyarakat. Sampai saat ini, yaa tujuan kita tetap sama mbak.. ingin menjadikan warga ini berdaya, tidak di masa pandemi saja kami memberi pemahaman ke warga. Namun memang sistem pada saat ini masih di tahap pemulihan dan pemeliharaan.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

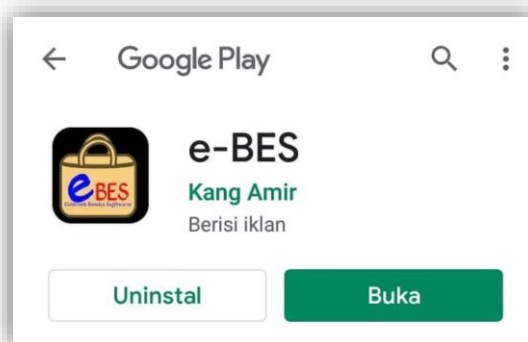
Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber di atas, dapat diketahui bahwa adanya sistem *e-BES* dirancang sebagai upaya mengoptimalkan pelayanan dalam kondisi darurat yaitu pada masa pandemi. Dalam mencapai tujuan sistem sebagaimana yang dijelaskan dalam wawancara, Pemerintah Desa Sugihwaras tetap mempertahankan dan mengupayakan *e-BES* tetap aktif setelah ini namun sistem masih dalam kondisi *maintenance* panjang.

Jangkauan Akses

Jangkauan akses *e-BES* untuk pengelolaan BUMDes Sukses Bersama berkembang dalam lingkup wilayah Desa Sugihwaras dan sekitarnya. Berfokus kepada sejumlah perangkat yang digunakan, untuk akses pengguna dikhususkan perangkat apa saja. Selain itu pada aspek ini perlu diketahui bahwa apakah aplikasi *e-BES* dapat merekam dan menemui jumlah pengunjung yang mengakses *e-BES* dengan durasi akses.

Dijelaskan oleh Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* dalam wawancaranya:

“Saya ciptakan *e-BES* pakai komputer dengan bantuan *cloud server* atau VPS Singapore. Kalau dari saya sebagai perancang *e-BES*, akses bisa dari laptop.. di HP juga bisa. Bagi pengguna lain seperti pihak admin BUMDes lalu penjual dan pembeli hanya bisa akses melalui perangkat HP saja mbak. Mudah di cari dapat di download di *playstore*, terus yaa di akun sosmed desa itu ada kok mbak kami infokan di Instagram, Facebook buat yang mau memakai *e-BES* download di *playstore*. Pengguna saat akan mengakses bebas.. dalam catatan pada saat *log in* tidak bisa menggunakan akun ganda karena ada golongan sendiri yaitu hak akses super admin, hak akses admin, dan hak akses user. Hak akses super admin saya pegang sebagai perancang *e-BES* dan admin pengelola BUMDes, hak akses admin oleh pelaku usaha UMKM Desa Sugihwaras yang produknya di upload di *e-BES*, hak akses user yaitu masyarakat /pembeli. Di saya dapat terpantau sistem analitik di menu *dashboard* menampilkan statistik jumlah pengunjung secara keseluruhan yang menggunakan *e-BES*. Durasi waktu penggunaan bebas mbak, tidak ada batasan untuk akses penggunaan.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)



Gambar 5 *e-BES* Tampilan Lama di *playstore*

Sumber: Play Store, 2026

Berdasarkan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa jangkauan akses sistem *e-BES* cukup mudah. Pemerintah Desa Sugihwaras dan admin BUMDes memiliki hak penuh akses untuk pengelolaan sistem *e-BES*. Masyarakat juga dengan mudah menerima jangkauan akses karena *e-BES* bersifat *device-friendly*, sangat fleksibel digunakan di perangkat *smartphone* dan praktis dapat di unduh melalui *google playstore*.

Konten Sistem

Pada aspek konten berfokus pada bagaimana gambaran materi atau informasi yang disampaikan dalam aplikasi *e-BES*. Konten mengarah pada isi informasi yang dilihat oleh *viewers*, dipresentasikan melalui teks, gambar, suara, dan video. Karena sistem aplikasi ini berbasis pemasaran digital, *e-BES* dibuat dengan format konten pemasaran. Rincian format yang sudah dibuat sesuai dengan kategori teks, visual dan video. Disampaikan oleh Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* dalam wawancaranya, bahwa:

“Isi konten sudah kami sesuaikan ya mbak, dari konten visual berupa foto tampilan produk dengan foto yang jelas disertai teks atau deskripsi produk. Pada tampilan *home* atau beranda luar kami tambahkan cuplikan promosi dengan desain yang menarik. Apalagi ditampilkan *e-BES* yang kedua, lebih tertata rapi.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Hasil wawancara Ibu Suliati penjual minuman teh poci, sekaligus beliau sebagai penyewa tenda lapak UMKM. Menyampaikan:

“Konten tampilan produknya sebenarnya bagus mbak.. tapi ga menyeluruh, karena ada mungkin kalo diliat itu produk dagangannya fotoe kurang menarik yang di pajang. Ini aku liate yang awal itu pas pandemi, anakku juga bilang katanya kurang estetik. Kan sayang kalo gara-gara foto yang kurang bagus jadi tidak menarik perhatian pembeli. Mungkin perlu disaring dulu sebelum upload foto produk, bisa diomongin sama penjualnya buat persiapkan foto produk sing lebih apik.” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2026)

Melalui hasil observasi dan wawancara, pada aplikasi elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) terdapat konten-konten yang menyerap konsep *e-commerce*. Spesifikasi konten utama dalam sistem mencakup profil singkat BUMDes, katalog produk terperinci, keranjang belanja, pembayaran dan pengiriman produk, serta fitur layanan tagihan warga. Dalam *e-BES* cakupan konten terkait profil singkat BUMDes, katalog produk terperinci sudah tersedia. Namun untuk pembayaran pengiriman produk, serta layanan fitur tagihan warga belum tersedia mengingat sistem masih pada tahapan perencanaan, pemeliharaan, dan pengembangan.

Interaksi Sistem

Pada aspek interaksi sitem ini, memuat bagaimana Interaksi Pemerintah Desa Sugihwaras atau pengelola BUMDes dengan perangkat pengguna *e-BES*. Interaksi sebagai bentuk dari jembatan komunikasi dua arah antara penyelenggara desa (Pemerintah Desa /BUMDes) dan masyarakat melalui perangkat elektronik layanan *e-BES*. Berdasarkan basis sistem aplikasi *e-BES* adalah digitalisasi ekonomi desa guna memberdayakan perekonomian warga, maka yang menjadi tolak ukur model interaksi sistemnya yakni konsep G2C (*Government to Citizen*) dan G2B (*Government to Business*). Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES*, menyampaikan:

“Interaksi dari pemerintah ke masyarakat terkait *e-BES* masih belum berkala ya mbak sebenarnya, sosialisasi yang terjadwal gitu belum. Masih hanya pada saat pertama kali kita kenalkan itu di acara Program Pendampingan UMKM Desa. Selebihnya masih penyebaran by WA

dan mulut kemulut. Sebenarnya pengennya sih juga dilakukan seperti itu, cuma sistem juga lagi masa perbaikan. Masih kami usahakan dan kaji ulang. Terutama juga saya berbagi waktu dengan pemeliharaan sistem elektronik yang lain di desa ini. Melalui platform seperti *e-BES* ini kan mbak.. semisal nanti usaha kami berhasil berkelanjutan bukan hanya pada saat pandemi. Semoga yaa.. semoga.. nanti setelah ini akan kembali aktif. Maka *e-BES* merupakan bentuk fasilitas yang diciptakan untuk BUMDes dan pelaku bisnis di Desa Sugihwaras dalam memasarkan produk.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, dapat diketahui bahwa interaksi antara pemerintah dengan masyarakat desa kemudian interaksi antara pemerintah dengan pelaku bisnis /pelaku UMKM sudah terjalin. Namun belum mencapai model interaksi sistem konsep G2C (*Government to Citizen*) dan G2B (*Government to Business*) secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai kendala teknis maupun struktural yang saat ini masih terus diupayakan solusinya oleh pemerintah desa.

Faktor Pendukung

Pada aspek faktor pendukung berfokus pada kebijakan pembuatan aplikasi *e-BES* yang didukung oleh Kepala Desa. Di era transformasi digital, adanya kesadaran terkait pentingnya pelayanan yang inklusif dan responsif menjadi faktor utama yang mendukung kemudahan *e-BES* berjalan di Desa Sugihwaras.

Melalui hasil wawancara Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* mengungkapkan:

“Kalau faktor pendukungnya jelas ya mbak.. dari kebijakan Bapak Kepala Desa. Yang paling utama kebijakan dari beliau.. bagaimanapun inovasi kita kalau Bapak Kepala Desa tidak mengizinkan ya tidak jalan.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Ditambahkan juga pendapat dari Ibu Fitri selaku Ketua Pengawas BUMDes sekaligus admin *e-BES*, dalam wawancaranya disampaikan:

“Faktor pendukungnya yang paling penting yaitu dari pemerintah desa jadi kalo dari orang pemerintah desa bisa mengajak masyarakat, sosialisasi diutamakan yang benar benar berfokus ke *e-BES* tidak dicampur adukkan dengan kegiatan lain. Sehingga apabila sosialisasi berjalan dengan baik akan menghasilkan pemahaman bahwa aplikasi *e-BES* dirancang ramah pengguna, pasti akan menambah minat pengguna.” (Wawancara pada tanggal 4 Mei 2026)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas, dapat dinyatakan bahwa keberhasilan suatu *e-BES* sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah desa sebagai pembuat kebijakan, perancang /pengelola sistem, dan masyarakat sebagai pengguna. Komunikasi yang baik sangat dibutuhkan supaya terjalin keefektifan layanan.

Faktor Penghambat

Pada aspek faktor penghambat berfokus pada tantangan yang muncul pada saat berjalannya sistem. Faktor penghambat sistem aplikasi *e-BES* yang pertama dari masyarakat Desa Sugihwaras khususnya bagi calon sasaran pengguna masih minim pengetahuan terkait teknologi digital. Selain itu, tentunya peran penting sumber daya perancang dan pengelola sistem menjadi tolak ukur meminimalisir faktor penghambat. Sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Bapak Nur Amiril selaku Kasi Pelayanan Pemerintah Desa Sugihwaras sekaligus perancang sistem aplikasi *e-BES* mengungkapkan:

“Faktor penghambat itu tergantung bagaimana dari masyarakatnya mbak, karena kalau menurut saya apabila kami mengeluarkan inovasi lalu dari masyarakat tidak mau memakai yaa tidak bisa berjalan sistem yang kami buat. Selain itu... sebenarnya saya sendiri juga memegang

website di beberapa desa selain Desa Sugihwaras, di Kecamatan Candi ini ada Desa Tempulungan, Desa Larangan, Desa Durung Panjang dan Desa Jambangan. Website desa-desa tersebut buatan saya, saya kelola juga. Sebenarnya fokus saya saat ini masih terbagi, selain mengurus website saya juga sedang mengembangkan beberapa aplikasi di Desa Sugihwaras yaitu ada si paras, e-dawis, dan simahir” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

\Terkait dana pembuatan juga mbak, kalau paket untuk aplikasi mobile kan biayanya lebih daripada paket dasar website. Biaya lanjutan aplikasi mobile kisaran puluhan juta mbak.. satu aplikasi bisa 30-40jt. Dukungan anggaran 5jt dari APBDes ini untuk inovasi informasi publik di *desa sugihwaras* terutama buat aplikasi dan website masih kami upayakan. Bersamaan dengan pengembangan sistem yang lainnya ada siparas sistem pelayanan posyandu desa sugihwaras, e-dawis elektronik dasa wisma, simahir sistem data kematian dan kelahiran dan *smart RT*.” (Wawancara pada tanggal 20 April 2026)

Mengambil sudut pandang dari pengguna terkait faktor penghambat aplikasi *e-BES*, disampaikan hasil wawancara dari pengguna pelaku UMKM dan pembeli: Pak Nanang selaku koordinator keuangan tenda lapak UMKM di BUMDes, menyampaikan: “Fokusnya ini kan penggunaan sistem teknologi, saya mewakili para pedagang ya mbak.. kalo kebanyakan dari kami ini ga ngerti teknologi. Terus disuguhkan saja aplikasi *e-BES* tanpa adanya informasi lebih lanjut soal penggunaane, ya jujur saja kami tidak bisa dan sekalipun kita tau ada aplikasi *e-BES* mungkin beberapa diantara pelaku UMKM ini ada rasa enggan. Kalau dulu mungkin beberapa ada yang dimudahkan karena akhirnya ditengah pandemi dagangannya tetap laris. Kalau sudah saat ini kan alhamdulillah masyarakat juga sudah aktif kegiatan perekonomiannya terutama berdagang, pasti lebih milih nyaman buka dilapak saja.. takut nanti kalo pake *e-BES* ribet. nah terus karena katanya tadi juga lagi perbaikan sisteme, harapan saya mungkin setelah benar-benar jadi kami seluruh lapisan pelaku UMKM mungkin bisa di ajak pelatihan juga mbak terkait penggunaan. Bukan hanya sosialisasi saja, pelatihan ini perlu mungkin untuk beberapa kali pertemuan supaya terbiasa menggunakan aplikasi *e-BES* sebelumnya kan kami kami ini ga terbiasa melayani dari aplikasi penjualan.. kalau chat dari WA ya bisa aja seperti komunikasi biasa.” (Wawancara pada tanggal 17 Mei 2026)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya selama perjalanan *e-BES*. Implementasi sistem digital elektronik BUMDes Sugihwaras terhambat karena tiga kendala utama. Pertama, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) khusus pendamping perancang sistem *e-BES*. Kedua, minimnya alokasi dana di tengah prioritas sistem elektronik lainnya di desa. Serta terakhir, rendahnya literasi digital masyarakat desa akibat kurangnya sosialisasi *e-BES* dari pihak Pemerintah Desa Sugihwaras.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi sistem aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) dalam pengelolaan BUMDes di Desa Sugihwaras, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo belum berjalan secara efektif. Analisis berdasarkan teori Aprilia et al. (2014) menunjukkan bahwa meskipun *e-BES* telah mendukung pemasaran produk UMKM, mempermudah akses layanan digital, dan menjadi inovasi dalam pengelolaan BUMDes, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesenjangan literasi digital masyarakat, proses pemeliharaan sistem yang berkepanjangan, belum optimalnya sosialisasi oleh pemerintah desa, serta fitur aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Selain itu, interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha melalui *e-BES* belum sepenuhnya mendukung layanan digital yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sosialisasi, serta

penyempurnaan sistem agar e-BES dapat mendukung pengelolaan BUMDes yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Afandi, Yasmin., Prathama, Ananta., (2022). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Aplikasi Elektronik BUMDes Sugihwaras (*e-BES*) di Desa Sugihwaras Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo. Jawa Timur: UPN Press.
- Aprilia., Wijaya., dan Suryadi. (2014). Efektivitas *Website* Sebagai Media *E-Government* dalam Meningkatkan Pelayanan Elektronik Pemerintah Daerah (Studi Pada *Website* Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang). Malang: Wacana, – Vol. 17, No. 2.
- Arief, Verdico., & M Ade. (2018). Efektivitas Penerapan Konsep E-Government dalam Bentuk Aplikasi Elektronik Kelurahan pada Kelurahan Sungaibangkong Kecamatan Pontianak Kota Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat. *Transformasi Pontianak: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, Vol. 10 No. 2.
- Aristoni, (2020). Implementasi Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Model Pelayanan Publik Berbasis Sistem Informasi Desa pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Jepara Perspektif Islam Terapan. Jawa Tengah: Kudus University Press.
- Asgarkhani, M. (2005). Efektivitas E-Layanan di Pemerintah Daerah: Studi Kasus. *The Electronic Journal of e Government Volume 3 Issue 4*, pp 157-166, tersedia online di www.ejeg.com
- Dhea, Nurul. (2019). Efektivitas Sistem Informasi Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Pasar (Siladamas) di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban untuk Peningkatan Pendapatan Retribusi Pasar. Surabaya: Publika Jurnal Administrasi Publik FISH Unesa.
- Eka, Riris., Oktafoa, Renny., (2021). Strategi Pemasaran Berbasis *Online* pada Produk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Sukses Bersama” Desa Sugihwaras Kabupaten Sidoarjo. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Elsa, Muhammad., & M. Syafitri. (2020). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pendapatan Asli Di Desa Sukajadi Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.9, No.1: 91-101.
- Evanas, Yen. (2007). *E-Government: Evolusi Hubungan Antara Warga Negara dan Pemerintah, Pembangunan Domestik dan Internasional*. Departemen Ilmu Pengambilan Keputusan dan Sistem Informasi Manajemen, Universitas Miami, Oxford, OH 45056, AS.
- Fairuz, Eka. (2019). Efektifitas Pelayanan SAMSAT 86 di UPTD Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Bangkalan Madura (Studi Kasus di Desa Kokop Kabupaten Bangkalan). Surabaya: Publika Jurnal Administrasi Publik FISH UNESA.
- Fanida, Eva Hany., & Karuniawati, R. D. (2010). *Effectiveness Of Electronic Conference System Development Plan (E- Musrenbang)* Tambaksari District. Surabaya: Administrasi Negara, 1–11.
- Fred, D. Davis. (1989). *Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User Acceptance of Information Technology*. *MIS Quarterly*, Vol 13, No. 3, hlm. 319-339.
- Gede, I., Ade, Made., Ketut, I., (2020). Perencanaan Masterplan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Desa Berbasis *E-Government*. Bandung: STMIK Primakara Press.
- Heeks, Richard. (2006). *Implementing and Managing e-Government: An International Text*. London: Sage Publications.
- Marsiano, Rocky M. (2021). Implementasi Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara (Studi Kasus Bumdes Buluh Duri Mandiri). Jatinagor: Diploma Thesis: IPDN Jatinangor.

- Mita. (2021). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Sunggumanai Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. Makassar: Unismuh Press.
- Purnamawati, Diah., Suyeno, Anadza, Hirshi. (2022). Efektivitas Program Aplikasi Sistem Informasi Mojokerto dalam Meningkatkan pelayanan publik (Studi pada DPMPTSP Kota Mojokerto). Malang: Unisma Press.
- Putriani, Ferdiana. (2022). Efektivitas Sistem E-Planning Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tulungagung). Surabaya: Publika Jurnal Administrasi Publik FISH UNESA, Volume 10 Nomor 4.
- Rahmawati, Wuri., & Arwananing, Zahra. (2020). Pengembangan Sistem Informasi Desa untuk *E-Government* di Desa Girikerto. Yogyakarta: SEMINAR NASIONAL Dinamika Informatika 2020 Universitas PGRI Yogyakarta, Vol 4, No 1.
- Satwika, Shadu., & Sutikno, Chamid. (2020). Governansi Publik dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah: Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, Volume 18 Nomor 2.
- Sukarwi., Khair, Abdul., Kafrawi., Zunnuraeni. (2020). Pemanfaatan Potensi Badan Usaha Milik Desa sebagai Daya Ungkit Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mataram: Mataram University Press.
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- United Nations. (2008). *UN e-Government Survey 2008: From e-Government to Connected Governance*. Unites Nations Publications.
- Wahyu, Andi. (2022). Sistem Pengelolaan Informasi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Berbasis Web Di Desa Bana Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone.